

# Pemberdayaan Petani Miskin Di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Burhanuddin R.\*

*This article based on observation conducted in two remote areas in the province of South Sulawesi. The observation revealed some interesting and also critical as well since the program of eliminating poverty among the poor peasants in these area have not been completed yet. Or even reached its final goals. More preparation should be taken before implementing the program, so the program can able meet the needs of those poor peasant. This kind of program is absolutely important for them but still require some improvements in structuring the management program.*

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi (*economic crises*) di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, diantaranya diawali dengan terjadinya krisis mata uang (*currency crises*) dan disusul dengan krisis keuangan (*financial crises*). Kejadian ini telah memporakporandakan perekonomian Indonesia dalam waktu sekejap. Padahal di akhir dekade tahun 1980-an Indonesia pernah dipuji sebagai salah satu negara industri baru (NIE's). Ketika sebagian negara-negara di Asia Timur (Thailand dan Korea Selatan) mulai bangkit, Indonesia sepertinya masih terus bergelut dalam proses pemulihan.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Timur, krisis di Indonesia telah mencapai pada tahap krisis multi dimensi. Kalangan pakar berpendapat bahwa secara teknis proses *recovery* untuk krisis mata uang dan krisis keuangan lebih mudah diatasi dibanding krisis ekonomi. Keterlambatan mengambil keputusan yang tepat ternyata berakibat fatal dan krisis merambah hampir kesemua aspek kehidupan. Namun harus diakui pula bahwa ketika krisis mata uang berlangsung, ternyata beberapa daerah justru berhasil meraih manfaat krisis. Daerah-daerah tersebut (seperti : Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) memiliki sektor pertanian yang relatif kuat, terutama untuk tujuan ekspor. Menguatnya nilai tukar US dollar terhadap rupiah, mendorong penerimaan petani ekspor dalam rupiah meningkat drastis. Beberapa produk ekspor yang mengalami *booming* antara lain: udang, vanili, rotan, pala, dll.

---

\* Peneliti pada Deputi Pengkajian Sumberdaya KUKM, Jakarta.  
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Sementara itu, sektor pertanian di Jawa, justru mengalami masalah karena munculnya fenomena de-urbanisasi. Sulitnya mencari pekerjaan di kota telah berakibat pada kembalinya tenaga kerja ke sektor pertanian. Akibatnya, pendapatan riil sektor pertanian tetap tertinggal dibandingkan dengan pendapatan dari sektor manufaktur. Walaupun sektor pertanian pernah mengalami pertumbuhan cukup berarti di masa lampau tetapi ternyata kondisi ekonomi petani miskin cenderung *stagnant*. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya khusus agar kesejahteraan petani miskin segera membaik. Salah satu bentuknya adalah melalui program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan untuk petani khususnya di daerah tertinggal atau miskin. Berdasarkan informasi awal tersebut, dilakukan suatu observasi spesifik dalam rangka menelaah penerapan program untuk mengendalikan jumlah petani di beberapa daerah terpencil dan nyaris tertinggal (*remote area*).

Program dimaksud adalah Program Pemberdayaan Petani Miskin dikelola melalui sistem Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian. Semula sistem ini dinamakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kemudian dirubah menjadi BPLM untuk menghindari kesan bantuan masyarakat secara cuma-cuma atau dana hibah. Tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani dengan jalan membantu petani dalam memproduksi komoditas pertanian tertentu. Sistem BPLM dilaksanakan melalui pola dana bergulir (*revolving fund*) dari satu kelompok tani ke kelompok tani lainnya. Dalam implementasinya, BPLM diselenggarakan melalui Proyek Pemberdayaan Agribisnis (PPA) yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, dan Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan (PPKP) yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pangan Kabupaten Jeneponto.

Observasi yang telah dilakukan secara umum diarahkan untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan program pemberdayaan petani di daerah tertinggal/terisolir untuk meningkatkan kesejahteraan. Berkenaan dengan itu, beberapa langkah pengamatan yang diterapkan antara lain adalah :

1. Mengamati perkembangan Program Pemberdayaan Petani Miskin di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

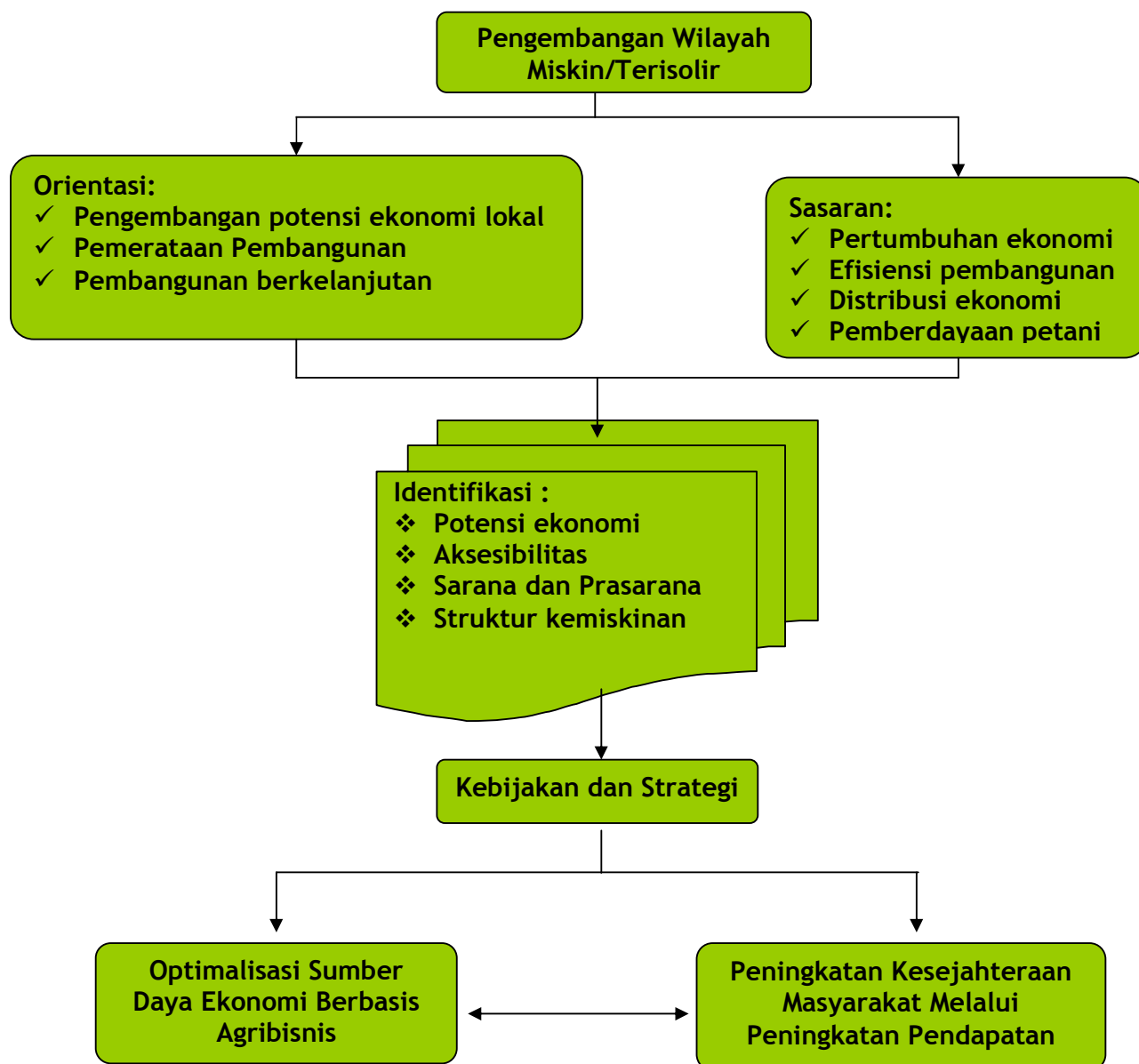
2. Memperoleh informasi tentang kondisi kemiskinan masyarakat petani miskin di daerah tertinggal/terisolir, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang dapat dioptimalkan bagi peningkatan kesejahteraan petani sebagai solusi dalam menekan kemiskinan di daerah tersebut.

Dalam observasi deskriptif ini diterapkan tiga pendekatan yakni *Pertama*, pendekatan ekonomi untuk mengamati perkembangan penghasilan dan produksi petani. *Kedua*, pendekatan sosial-budaya digunakan dalam kaitan dukungan aspek-aspek kemasyarakatan dalam implementasi program pemberdayaan petani. *Ketiga*, pendekatan kelembagaan untuk mengamati peran dan fungsi kelembagaan sejalan dengan tujuan program pemberdayaan.

Lokasi observasi ditentukan secara sengaja (*Purposive sampling technique*) mengingat program pemberdayaan hanya terdapat pada lokasi tertentu saja. Lokasi dimaksud adalah Desa Allu' Taroang dan Desa Ti'no yang berada di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Kedua desa tersebut termasuk dalam kategori desa tertinggal atau terisolasi yang memiliki permasalahan dalam hal transportasi dan komunikasi dengan desa atau tempat lain. Pada kedua desa tersebut dilakukan wawancara terhadap 50 orang petani, sebagai representasi komunitas petani miskin yang penghasilannya secara ekonomis tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidupnya (*subsistence*).

Penyusunan strategi pemberdayaan petani miskin umumnya didasarkan pada pertimbangan permintaan dan penawaran. Pada satu sisi, bagaimana petani memproduksi barang dan jasa sesuai dengan potensi yang ada. Dalam kaitan ini potensi petani digolongkan sebagai faktor internal, sedangkan hambatan, tantangan dan permintaan pasar adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku. Dalam rangka pemberdayaan petani melalui upaya peningkatan produksi barang dan jasa, masih sangat diperlukan adanya intervensi dari pihak pemerintah atau swasta. Bagaimana bentuk campur tangan tersebut dan pada tahapan mana pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah atau swasta perlu ditentukan dengan tegas. Hal ini untuk

menghindari rasa ketergantungan petani terhadap pemerintah dan sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab pada para petani. Sejauh ini tidak sedikit bantuan yang telah diberikan ke petani miskin, tetapi karena tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan rasa memiliki yang kuat maka bantuan tersebut pada akhirnya kurang atau bahkan tidak bermanfaat bagi petani. Secara lebih ringkas, kerangka pikir observasi ini dirumuskan sebagai berikut :



Dalam observasi ini digunakan beberapa analisis yang antara lain adalah :

- 1) Analisis Kelayakan Teknis yang terkait dengan aspek teknis investasi dan meliputi analisis bahan baku; SDM; Peralatan; Pemasaran; Sarana Pendukung.
- 2) Analisis Manfaat dan Biaya (*B/C Ratio Analysis*), untuk menentukan kelayakan ekonomis suatu kegiatan dengan membandingkan nilai manfaat terhadap beban kerugian (biaya).
- 3) Analisis Sosial-Budaya, untuk mengamati pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
- 4) Analisis Kelembagaan, untuk melihat sejauhmana peran lembaga terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.

## **PROFIL WILAYAH OBSERVASI**

Kabupaten Jeneponto terletak di bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) dengan jarak sekitar 90 km (sekitar 2 jam kearah selatan Kota Makassar). Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Takalar di bagian utara, di sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores, sebelah timur dengan Kabupaten Bantaeng dan di sebelah barat berbatasan lagi dengan Kabupaten Takalar. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 74.979 ha (749,79 km<sup>2</sup>) atau hanya sekitar 1,20 persen dari total luas provinsi SulSel (62.361,71 km<sup>2</sup>). Di wilayah Kabupaten Jeneponto terdapat sembilan kecamatan dengan ibukota kabupaten (Bontosunggu) terletak di Kecamatan Binamu.

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Jeneponto sangat variatif dan dikenal sebagai wilayah 'bayangan hujan' karena terletak di balik gunung Lompobattang, sehingga intensitas hujan lebih banyak tercurah di wilayah sebaliknya. Di bagian pedalaman sebelah utara (Kecamatan Kelara), tepatnya di kaki gunung tersebut terdapat dataran tinggi dan perbukitan yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian antara 500 sampai dengan 1.727 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini beriklim basah dan lembab selama lima sampai enam bulan setiap tahun, dan berpotensi sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Dataran rendah (ketinggian 0 - 150 meter dpl ) terbentang di bagian tengah hingga ke selatan. Dataran rendah ini, umumnya dimanfaatkan sebagai sawah tadah hujan dan tegalan. Sedangkan daerah pesisir pantai (sepanjang 95 km) dikelola untuk menghasilkan garam,

budidaya rumput laut dan perikanan tradisional dengan potensi hasil laut seperti udang, ikan cakalang dan kepiting. Perbedaan letak antar kecamatan di wilayah Kabupaten Jeneponto menyebabkan adanya perbedaan langsung dalam pengembangan potensi ekonomi per kecamatan.

Keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya beriklim kering dengan curah hujan relatif rendah rata-rata sekitar 78,2 mm per tahun dan rata-rata hari hujan 108 hari per tahun. Suhu udara berkisar antara 30 sampai dengan 35<sup>0</sup> C pada siang hari. Selama lima tahun terakhir (2000 – 2005) curah hujan sangat tidak kondusif untuk mendukung kegiatan bercocok tanam. Musim hujan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2000 pada kadar rata-rata 97,57 mm, kemudian menurun menjadi 44,97 mm pada tahun 2001. Curah hujan mencapai titik paling rendah pada tahun 2002 (rata-rata 19,58 mm) lalu meningkat lagi menjadi rata-rata 56,28 mm di tahun 2003. Musim hujan terjadi antara bulan Nopember hingga bulan April dengan puncak curah hujan (174 mm) terjadi pada bulan Januari dan paling rendah pada bulan Agustus (3 mm). Musim kemarau terjadi dari bulan Mei hingga bulan Oktober.

Rata-rata pertambahan penduduk selama lima tahun terakhir relatif rendah sekitar 0,58 persen per tahun dengan kecenderungan meningkat setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi sejak tahun 1990 terdapat di Kecamatan Bontoramba (rata-rata 1,5 persen per tahun) dan paling rendah terkonsentrasi di Kecamatan Turatea (rata-rata 0,4 persen per tahun). Adapun tingkat kepadatan penduduk terpusat di ibukota Kecamatan Binamu sebanyak 685 jiwa per km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bangkala Barat sebanyak 147,52 jiwa per km<sup>2</sup>. Secara keseluruhan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> di wilayah seluas 749,79 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 324.928 jiwa adalah 433 jiwa per km<sup>2</sup>. Gambaran profil wilayah dan penduduk di Kabupaten Jeneponto tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.  
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Penduduk  
di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2004.

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jarak dari Kab (km)	Jumlah Desa	Jml Pddk (jiwa)	Rumah Tangga
1	Bangkala (Allu)	121,82	25	13	47.228	10.976
2	Bangkala Barat (Bulu Jaya)	152,96	41	8	22.565	5.199
3	Tamalatea (Tanetea)	57,58	10	12	38.331	8.661
4	Bontoramba (Bontoramba)	88,30	13	12	34.531	7.534
5	Binamu (Bontosunggu)	69,49	1	13	47.603	10.163
6	Turatea (Paitana)	53,76	6	10	28.214	6.697
7	Batang (Togo-Togo)	73,72	11	14	40.249	9.068
8	Arungkeke (Arungkeke)	29,91	10	7	17.395	3.844
9	Kelara (Tolo)	102,25	13	22	48.812	11.266
Jeneponto		749,79	-----	111	324.928	73.408

Sumber : Diolah dari Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2005.

Keterangan : - dalam kurung nama ibukota kecamatan.

Ditinjau dari segi usia kerja (penduduk berusia diatas 10 tahun berjumlah 129.451 orang), maka sebanyak 77,41 persen penduduk (100.210 orang) bekerja di sektor pertanian (*on farm*), dan di sektor perdagangan 6,41 persen (8.292 orang), selebihnya di sektor transportasi, konstruksi, jasa, dll. Sedangkan di sektor industri pertanian hanya sekitar 1,39 persen (1.805 orang). Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 22,80 persen (29.515 orang) berusaha sendiri tanpa bantuan tenaga kerja, baik dari anggota keluarga sendiri maupun non keluarga. Penduduk yang bekerja dengan bantuan tenaga kerja keluarga dan buruh tidak tetap 36,60 persen (47.382 orang) dengan buruh tetap hanya 2,85 persen (3.685 orang). Sedangkan penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian (profesi pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha, dll.) sebanyak

11,97 persen (15.498 orang), selebihnya dalam jumlah cukup besar 26 persen (33.371 orang) tidak/belum memiliki pekerjaan tetap.

Pada tahun ajaran 2003/2004 tercatat sebanyak 76.208 orang (24 persen) sedang menempuh pendidikan di semua tingkatan sedangkan penduduk usia sekolah diperkirakan 135.000 orang, sehingga ditengarai jumlah penduduk usia sekolah yang putus sekolah atau sama sekali tidak bersekolah cukup besar. Lulusan SD sepanjang kurun waktu tahun ajaran 1998/1999 hingga 2002/2003 tercatat sebanyak 5.100 orang murid, SLTP 2.400 orang, SMU 1.100 orang, SMEA 230 orang. Di tingkat perguruan tinggi terdapat 300 mahasiswa dari tiga institusi (Unismuh, STKIP dan STIE Yapti).

Dalam hal pembentukan produk domestik bruto (PDRB) selama empat tahun terakhir (1999–2002) ditemukan bahwa kontribusi sektor pertanian semakin menurun dari 59 persen (tahun 1999) menjadi 55 persen pada tahun 2002. Demikian pula halnya dengan sub sektor tanaman pangan menurun dari 45 persen (tahun 1999) menjadi 41 persen (tahun 2002). *Trend* pendapatan per kapita masyarakat, dalam periode yang sama cenderung melemah. Tahun 2000 tercatat sebesar Rp. 762 ribu; tahun 2001, menurun menjadi Rp. 758 ribu; dan tahun 2002, meningkat menjadi sebesar Rp. 778 ribu per kapita.

Jenis tanah yang dominan di kabupaten ini adalah Alluvial, Gromosal, Mediteren, Lotosal, Andosil dan Regonal. Sesuai dengan kondisi iklim, topografi dan jenis tanah tersebut, Kabupaten Jeneponto memproduksi padi di areal persawahan (tadah hujan) dan tegalan atau ladang. Beberapa tanaman palawija yang dihasilkan di tanah tegalan antara lain seperti Jagung, Ubi Jalar, Ubi Kayu (singkong), Kacang Tanah, Kacang Kedele, dan Kacang Hijau.

Kegiatan bercocok tanam pada umumnya sangat mengandalkan kepada frekuensi dan intensitas curah hujan. Dari sembilan kecamatan yang ada, lima kecamatan diantaranya sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai berhasil melakukan panen padi sebanyak dua kali dalam setahun di areal persawahan (7.027 ha). Hal ini didukung oleh keberadaan pengairan irigasi setengah teknis di kelima kecamatan tersebut. Sedangkan areal persawahan di empat kecamatan lainnya (2.219 ha) tetap mengandalkan curah hujan sehingga hanya menanam padi sekali dalam setahun.

Tabel 2.  
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija di Kabupaten  
Jeneponto, Tahun 2000 – 2003.

No	Jenis Tanaman	Produksi per Tahun (Ton)			
		2000	2001	2002	2003
1	Padi Sawah	71.013,61 (4,7 ton) (15.087 ha)	83.270,00 (4,7 ton) (17.379 ha)	84.437,61 (4,8 ton) (17.375 ha)	82.384,27 (4,9 ton) (16.759 ha)
2	Padi Ladang	2.657,21 (3,03 ton) (876 ha)	3.747,60 (3,03 ton) (1.234 ha)	3.692,29 (3,13 ton) (1.176 ha)	3.588,91 (3,13 ton) (1.144 ha)
3	Jagung	131.770,94 (3,35 ton) (39.337 ha)	112.375,40 (3,35 ton) (36.604 ha)	136.610,73 (3,34 ton) (40.715 ha)	126.977,48 (3,77 ton) (33.669 ha)
4	Ubi Jalar	738,02 (6,12 ton) (119 ha)	646,29 (6,21 ton) (104 ha)	167,89 (6,22 ton) (27 ha)	512,46 (8,27 ton) (62 ha)
5	Ubi Kayu	172.181,37 (22,15 ton) (7.785 ha)	183.685,54 (22,31 ton) (8.235 ha)	187.519,60 (22,35 ton) (8.392 ha)	171.647,52 (22,34 ton) (7.684 ha)
6	Kacang Tanah	442,13 (1,28 ton) (345 ha)	304,81 (1,28 ton) (239 ha)	594,70 (1,56 ton) (379 ha)	840,65 (1,62 ton) (518 ha)
7	Kacang Kedele	3.617,22 (1,30 ton) (2.776 ha)	3.298,51 (1,30 ton) (2.521 ha)	4.207,66 (1,41 ton) (2.829 ha)	5.372,68 (1,56 ton) 3.456 ha)
8	Kacang Hijau	4.677,80 (0,90 ton) (5.252 ha)	2.321,27 (0,90 ton) (2.620 ha)	2.237,91 (0,90 ton) (2.534 ha)	5.257,95 (0,90 ton) (5.858 ha)

Sumber : Diolah dari Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2003.

Keterangan :

- dalam kurung baris pertama produktivitas per hektar, baris kedua luas panen;
- produksi padi ladang hanya di 4 kecamatan (Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba dan Binamu);
- produksi ubi jalar hanya di Kecamatan Bangkala Barat;
- produksi kedele hanya di 4 kecamatan (Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea dan Bontoramba).

Total luas areal persawahan dengan fasilitas pengairan irigasi tidak banyak mengalami perubahan sejak tahun 2000 yakni 10.260 ha. Demikian pula infrastruktur irigasi berupa jaringan primer, sekunder, (15.545 km) dan tersier (115.308 km) kondisi dan pertambahannya relatif *stagnant*. Sumber air untuk

irigasi berasal dari beberapa sungai dan anak sungai yang debit airnya terpengaruh oleh frekuensi musim hujan. Bahkan sebagian sungai tersebut terletak di bagian lembah yang cukup dalam, jauh dari wilayah pemukiman dan areal persawahan sehingga menyulitkan pemanfaatannya. Akibatnya secara kualitas dan kuantitas keberadaan sungai dan persediaan air belum mencukupi keperluan konsumsi apalagi untuk usaha tani. Beberapa sungai yang potensial untuk pengembangan irigasi antara lain sungai Kelara, Pokobulo dan sungai Tamanroya dengan anak sungai Topa, Canda' dan sungai Allu. Sekitar lima tahun terakhir sungai Kelara mulai dimanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM Jeneponto.

Sebagian besar tanaman perkebunan masih dikelola secara tradisional dan terkonsentrasi di daerah tertentu. Sebagai contoh tanaman Cengkeh, Kopi, Kakao dan Tembakau hanya terdapat di Kecamatan Kelara, Kapas di Kecamatan Binamu, Batang dan Kelara, Kemiri di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat dan Bontoramba. Sedangkan Kapok, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dibudidayakan di kesembilan kecamatan yang ada.

Tabel 3.  
Perkembangan Tanaman Perkebunan Rakyat  
di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2000 – 2003.

No	Jenis Tanaman	Produksi per Tahun (Ton)			
		2000	2001	2002	2003
1	Cengkeh	90 (205 ha)	121,50 (205 ha)	101,00 (282 ha)	22 (282 ha)
2	Tembakau	--	--	---	106 (142 ha)
3	Kopi	290 (1.321 ha)	367,50 (1.321 ha)	1.202,50 (2.340 ha)	1.170,00 (2.340 ha)
4	Kakao	15,00 (35 ha)	16,00 (35 ha)	17,00 (112 ha)	28,00 (112 ha)
5	Kapas	286,61 (1.234 ha)	231,54 (641 ha)	187,98 (300 ha)	155,80 (368 ha)
6	Kemiri	552,50 (945 ha)	56,20 (945 ha)	572,50 (945 ha)	755,00 (845 ha)
7	Jambu Mente	629,00 (2.845 ha)	725,50 (2.845 ha)	1.029,00 (2.845 ha)	1.559,00 (2.845 ha)
8	Kelapa Dalam	3.943,00	3.960,00	4.144,00	6.472,00

		(4.677,50 ha)	(4.931,25 ha)	(5.188 ha)	(5.488 ha)
9	Kelapa Hibrida	191,00 (361 ha)	195,00 (361 ha)	214,50 (361 ha)	301,00 (361 ha)
10	Kapuk	1.102,50 (2.812 ha)	1.287,00 (2.812 ha)	1.440,50 (2.745 ha)	1.811,00 (2.745 ha)

Sumber : Diolah dari Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2003.

Keterangan : - dalam kurung luas areal tanaman.

Di sub sektor peternakan, lima jenis ternak dominan dipelihara untuk keperluan rumah tangga dan untuk tujuan komersial seperti Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba dimana Kuda dan Kambing merupakan binatang ternak terbanyak yang dikembangkan. Konsentrasi kepemilikan ternak terbesar terdapat di lima kecamatan yakni Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Binamu dan Kelara.

Tabel 4.  
Perkembangan Populasi Ternak Dominan  
di Kabupaten Jeneponto, Tahun 2000 – 2003

No	Jenis Ternak	Populasi per Tahun (Ekor)			
		2000	2001	2002	2003
1	Sapi	14.227	14.736	16.225	17.434
2	Kerbau	13.221	13.433	11.542	11.491
3	Kuda	18.854	20.455	17.098	18.156
4	Kambing	56.402	57.446	60.126	62.591
5	Domba	683	691	717	591

Sumber : Diolah dari Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2003.

Pemeliharaan unggas umumnya masih untuk memenuhi kebutuhan lokal setempat meskipun terdapat *trend* meningkat seiring dengan penambahan jumlah peternak skala kecil.

Tabel 5.  
Perkembangan Populasi Unggas di Kabupaten  
Jeneponto, Tahun 2000 – 2003

No	Jenis Ternak	Populasi per Tahun (Ekor)			
		2000	2001	2002	2003
1	Ayam Ras	4.788	19.725	25.692	179.749
2	Ayam Buras	246.430	584.318	258.753	728.275

3	Itik	78.152	115.432	83.064	163.905
4	Telur Ayam	329.688	331.145	338.840	338.981
5	Telur Itik	15.682	15.826	15.986	15.999

Sumber : Diolah dari Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2003.

Kondisi yang nyaris identik dapat diamati di sub sektor perikanan, dimana komunitas nelayan pantai dan daratan (empang atau tambak) mencerminkan keadaan yang lebih marjinal. Mayoritas penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan sebab kultur budidaya ternak ikan tawar belum begitu populer di kalangan masyarakat. Pada tahun 2003 dari sejumlah 6.161 KK nelayan hanya terdapat 103 KK (1,7 persen) yang melakukan budidaya ikan air tawar. Selebihnya berusaha sebagai nelayan ikan laut, rumput laut dan tambak (udang dan ikan bandeng) dengan luas areal tambak 5.339,20 ha. Hasil penangkapan ikan laut dari sekitar 25 jenis ikan diserap oleh pasar lokal. Fluktuasi hasil penangkapan ikan laut tersebut antara 12.000 ton hingga 13.000 ton per tahun sehingga dapat ditelusuri pendapatan masyarakat nelayan pantai dari hasil penangkapan tersebut.

#### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN**

Secara geografis dan topografis keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto memang kurang diuntungkan. Seluruh wilayah berada di daerah 'bayangan hujan' sehingga frekuensi dan intensitas hujan lebih banyak tercurah di bagian utara, kecuali apabila konsentrasi pembentukan awan hujan terjadi bersamaan baik di bagian utara dan bagian selatan gunung Lompobattang. Akibatnya periode musim hujan relatif singkat dan intensitasnya pun relatif rendah. Satu-satunya wilayah yang berada di kaki gunung Lompobattang yaitu Kecamatan Kelara merupakan daerah dengan pasokan air yang relatif memadai sehingga berpotensi sebagai penghasil sayur-sayuran, cengkeh dan buah-buahan. Namun selama ini potensi tersebut belum secara maksimal dikembangkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Delapan wilayah kecamatan lainnya memiliki topografi berbukit (tidak merata) dengan jenis tanah yang dipenuhi oleh bebatuan besar dan kecil.

Di Kecamatan Kelara, terdapat potensi sumber air yang sebenarnya tersedia cukup melimpah untuk memasok keperluan pengairan dan kebutuhan

air minum. Beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Binamu, Bangkala dan Bangkala Barat terdapat alur sungai yang cukup besar dengan debit air memadai. Keberadaan sumberdaya air ini baru mulai dimanfaatkan pada periode tahun 1990-an khususnya untuk pasokan air minum di ibukota kabupaten. Akan tetapi di beberapa kecamatan lain yang letaknya diatas 100 m dari permukaan laut, pasokan air menjadi semakin sulit dan langka, sebagai akibat belum terbangunnya jaringan sekunder dan tersier keseluruh wilayah. Keberadaan tiga buah bendungan di sekitar wilayah Kecamatan Kelara sampai saat ini belum berarti banyak baik untuk keperluan pengairan maupun untuk memutar turbin listrik.

Masyarakat Jeneponto sebenarnya dapat dikategorikan sebagai komunitas yang ulet dan tidak mudah menyerah dengan kondisi alam yang kurang bersahabat. Kelompok masyarakat yang memiliki asset berupa tanah sawah, ladang atau ternak umumnya tetap bertahan untuk melestarikan hubungan kekerabatan, budaya dan adat (siri' dan sipakatau : menjunjung etika dan silaturahmi). Meskipun begitu, akibat desakan kebutuhan ekonomi, terbatasnya kepemilikan lahan dan faktor produksi lainnya, maka tidak sedikit jumlah penduduk yang terpaksa berurbanisasi ke kota Makassar. Anggota masyarakat dengan usia produktif sebagian besar beralih profesi menjadi pengusaha di kota-kota besar pulau Jawa. Sedangkan yang kurang memiliki ketrampilan dan pendidikan terbatas berjuang di sektor informal, transportasi dan konstruksi di kota terdekat atau bahkan sebagai buruh migran di negara tetangga. Perpindahan sebagian penduduk ke kota-kota besar di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, terutama ke kota Makassar lambat laun berpengaruh kepada produktivitas di sektor pertanian.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertanian masih merupakan sumber penghidupan masyarakat tetapi tumpuan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Jeneponto mulai beralih ke sektor non pertanian. Namun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor transportasi, keuangan; dan jasa-jasa perkembangannya masih kurang signifikan. Pola pertumbuhan sektoral demikian cukup memprihatinkan sebab proses perubahan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang berarti.

Dari sisi pendapatan per kapita, ditemukan bahwa fluktuasi pendapatan per kapita yang cenderung bersifat *stagnant* sehingga tidak kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten setempat. Angka pendapatan per kapita tersebut hanya sekitar 50 persen dari tingkat pendapatan per kapita secara nasional dan hampir 75 persen dari pendapatan per kapita provinsi Sul-Sel. Dampak lebih lanjut dapat diamati dari rendahnya kapasitas investasi dan ekspansi usaha menjadi terhambat. Kegiatan ekonomi masyarakat bergerak sangat lamban sehingga proses marginalisasi komunitas petani tidak terhindarkan.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Jeneponto ditengarai tidak semata-mata karena faktor sumberdaya alam tetapi juga akibat lambannya respons birokrasi untuk mengatasi kendala yang ada (kemiskinan struktural). Selama ini dukungan sarana produksi (peralatan, sarana pra dan pasca panen) dan sarana pertanian (pupuk, bibit, obat-obatan) sangat terbatas sehingga produktivitas lahan per hektar, budidaya ternak dan perikanan cukup rendah.

Sistim agribisnis yang ditata secara profesional baru diperkenalkan pada awal tahun 2002. Dalam penerapannya, sistim agribisnis ini dikemas dengan paket pengenalan teknologi untuk tanaman palawija yaitu Jagung Kuning sebagai prioritas awal. Dari aspek produksi, terdapat peningkatan nyata dalam hal produktivitas per hektar. Hanya saja dukungan sarana pengolahan pra - pasca panen dan akses pasar belum memadai, sehingga belum berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi petani palawija. Sumber air tanah dalam untuk mengairi lahan belum dimanfaatkan karena efektivitas dan efisiensi penggunaan pompa air tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh. Tidaklah mengherankan bahwa petani lebih mengoptimalkan pendayagunaan lahan pada musim hujan.

Peningkatan produktivitas justru terjadi pada tanaman kopi setelah luas areal tanam ditingkatkan pada tahun 2002. Pada tanaman Kakao, luas areal tanam meningkat hampir tiga kali tetapi produktivitasnya malah menurun. Diperkirakan bahwa akibat musim kemarau panjang tahun 2001 dan 2003 serta berjangkitnya hama tanaman, maka hampir seluruh jenis tanaman perkebunan

produktivitasnya menurun. Kondisi perkebunan rakyat sebagai alternatif lain untuk mempengaruhi pendapatan petani dan kesejahteraan keluarganya, nampak masih memerlukan upaya lebih serius. Padahal pengembangan tanaman perkebunan rakyat yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, terutama di daerah dataran tinggi seperti di Kecamatan Kelara. Sebab, di sekitar daerah ini terdapat sumber mata air dan jaringan irigasi tersier yang lebih baik dibandingkan dengan daerah kecamatan lainnya. Oleh karena itu, perluasan jaringan irigasi patut diprioritaskan agar mampu mempengaruhi produktivitas pertanian maupun perkebunan rakyat. Namun perlu pula dicatat bahwa kultur pertanian masyarakat Jeneponto belum sepenuhnya beralih kepada kultur perkebunan. Keberadaan jaringan irigasi yang ada sebagian besar masih dalam kondisi semi permanen sehingga sangat rawan mengalami kerusakan terutama di musim hujan dengan intensitas curah hujan tinggi atau bila ada peningkatan debit air di hulu sungai.

Kepemilikan ternak bagi sebagian masyarakat petani di pedesaan di samping berfungsi sebagai asset juga sebagai simbol status kesejahteraan khususnya bagi komunitas yang menyandang predikat masyarakat petani miskin. Apabila dikaitkan dengan jumlah KK yang ada di Kabupaten Jeneponto sebanyak 73.408 KK, maka setiap KK rata-rata hanya memiliki 1,5 ekor ternak. Angka ini sekaligus menjelaskan *stigma* masyarakat miskin di kabupaten ini. Perkembangan populasi ternak besar dan unggas diharapkan berpengaruh positif terhadap pemenuhan gizi yang berasal dari protein hewani bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini dukungan instansi terkait di pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sangat dibutuhkan untuk menunjang perbaikan kesejahteraan ekonomi dan gizi masyarakat. Dengan demikian, diversifikasi aktivitas pertanian sebagai alternatif pendapatan masyarakat dapat dikembangkan di luar sub sektor tanaman pangan ke sub sektor peternakan dan perkebunan secara selektif. Meskipun begitu di Kabupaten Jeneponto belum terdapat kegiatan pemeliharaan ternak yang sepenuhnya untuk keperluan komersial atau pasar. Padahal permintaan daging Kuda dan Kambing untuk konsumsi masyarakat baik di kota Jeneponto dan Makassar menunjukkan kecenderungan meningkat sejak lima tahun terakhir.

Profil masyarakat petani di lokasi observasi merupakan refleksi empirik adanya proses marjinalisasi di Kabupaten Jeneponto. Desa Allu' Taroang dan Ti'no, Kecamatan Batang terletak di daerah perbukitan relatif 'terisolir' dari ketersediaan sumberdaya air, peralatan pra dan pasca panen, jaringan irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan serta akses pasar. Sentuhan program-program pemberdayaan petani miskin baru dimulai pada dekade tahun 2000-an melalui berbagai proyek namun kurang didukung oleh sarana dan prasarana kegiatan pertanian. Konsekwensinya sudah jelas yaitu masyarakat kurang dapat menikmati keberadaan proyek-proyek tersebut. Untuk mengatasi keadaan demikian diperlukan manajemen proyek yang lebih matang sejak tahap persiapan, perencanaan, implementasi, kontinuitas pengawasan hingga tahap evaluasi. Tanpa kesadaran dan upaya yang sangat intens sangat sulit diharapkan munculnya dampak positif dari program pembangunan pertanian.

Kecamatan Batang memiliki luas 73,72 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di Kabupaten Jeneponto (40.249 jiwa) dengan kepadatan penduduk sekitar 543 jiwa per km<sup>2</sup>. Desa Allu' Taroang dan Desa Ti'no adalah dua desa dari 14 (empat belas) desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Batang. Luas wilayah kedua desa sekitar, 3,70 km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian 500 sampai dengan 900 meter diatas permukaan laut. Jarak desa dengan lokasi ibukota Kabupaten Jeneponto sekitar 26 km dan tidak berada pada jalur lalulintas antar kota. Oleh karena itu, mobilitas masyarakat dan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan agak terhambat karena ketersediaan fasilitas transportasi sangat terbatas. Pasar desa hanya beroperasi sekali dalam seminggu pada hari Kamis. Di kedua desa ini hanya terdapat satu SD dengan jumlah murid sebanyak 201 orang dan diasuh oleh 10 (sepuluh) orang guru. Sementara itu, fasilitas kesehatan (Puskesmas) hanya terdapat di ibukota kecamatan yang berjarak 8 km dari pemukiman penduduk.

Penduduk Desa Allu' Taroang sebanyak 2.975 jiwa (Laki-laki 1.465 orang dan Perempuan 1.510 orang) dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 653 KK. Berdasarkan kriteria kemiskinan versi BKKBN, di desa ini terdapat 183 KK Pra Sejahtera, 348 KK Pra Sejahtera I dan 19 KK Pra Sejahtera II (atau 84 persen termasuk kategori miskin). Kepadatan penduduk sekitar 804 jiwa per km<sup>2</sup>

dan tersebar di empat lokasi pemukiman atau dusun-dusun kecil. Sebagian besar keluarga memiliki tempat tinggal di rumah tradisional berupa rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu, bambu, dan beratap seng. Pada umumnya rumah tinggal penduduk tidak dilengkapi dengan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) tersendiri di dalam rumah sehingga menggunakan MCK di luar rumah baik secara berkelompok atau terpisah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama di musim kemarau, masyarakat harus berjalan kaki atau menggunakan kuda sejauh 5 km ketempat yang memiliki sumber mata air.

Di Desa Allu' Taroang dan Desa Ti'no ini, responden yang diwawancarai (50 orang) berasal dari populasi Kelompok Tani peserta atau penerima BPLM melalui proyek PPA. Dari sejumlah 50 responden itu, 78 persen (40 orang ) bermata pencaharian pokok sebagai petani sawah dan menggarap lahan sawah sendiri, yang bekerja sebagai penjual ikan 7 persen (4 orang), pedagang tembakau 4 persen (2 orang), selebihnya berprofesi sebagai tukang becak dan tukang ojek di Kota Makassar 11 persen (5 orang). Penduduk desa (responden) yang memiliki sebidang sawah dengan luas tertentu terdapat sebanyak 88 persen (45 orang), 9 persen lainnya (4 orang) menggarap lahan sawah orang lain dengan sistem bagi hasil atau sewa. Rata-rata luas areal lahan yang digarap oleh 65 persen responden (33 orang) berkisar antara 0,25 sampai dengan 1 ha, kemudian 35 persen (17 orang) lainnya mengelola lahan dengan luas hamparan antara 1,1 hingga 3 ha.

Sekitar 70 persen (35 orang) dari petani responden tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang dapat diandalkan untuk mendukung penghasilan keluarga, 16 persen (8 orang) memiliki sebidang ladang yang layak digarap apabila tersedia air, setelah atau menjelang musim hujan. Sedangkan 14 persen (7 orang) lainnya bekerja sampingan sebagai buruh kasar, sopir, dll. Terbatasnya bidang dan jenis usaha yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk di kedua desa ini dapat direfleksikan dari data pendidikan formal masyarakat. Dari 50 responden tersebut, 70 persen (36 orang) hanya mengenyam pendidikan dasar (SD), tidak tamat SD 14 persen (7 orang) dan hanya terdapat satu orang lulusan perguruan tinggi, sisanya berpendidikan

SLTP dan SLTA. Kondisi ini menggambarkan adanya proses kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sumberdaya alam dan kualitas SDM.

Sesuai dengan kondisi lahan setempat (jenis tanah Gromosal), Desa Allu Taroang dan Desa Ti'no memiliki potensi pengembangan komoditas selain padi, yaitu Jagung Kuning, Kapas dan Kacang Haju. Sejak tahun anggaran 2003 sebagian penduduk desa ini yang tergabung dalam Kelompok Tani melalui proyek PPA mengembangkan dua komoditas pertanian yaitu Jagung Kuning dan Kapas. Meskipun begitu kegiatan pertanian selalu terlambat akibat ketergantungan pada air hujan. Secara teknis produksi Jagung Kuning dianggap cukup berhasil karena produksi per hektar sangat memadai. Namun harga jual di tingkat petani masih belum sepadan dengan biaya produksi yaitu antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 1.000,- per kg sedangkan harga yang diharapkan berkisar antara Rp. 1.100,- hingga Rp. 1.200,- per kg.

Khusus mengenai tanaman padi, hasil produksi yang dicapai oleh petani contoh sangat bervariasi dan bila dikelompokkan, 53 persen responden (27 orang) mengaku hanya memproduksi kurang dari 50 kuintal gabah kering giling per hektar, selebihnya mampu menghasilkan diatas 50 kuintal per hektar. Secara rata-rata produktivitas tanaman padi tentunya dapat dikategorikan cukup rendah bila dibandingkan dengan daerah penghasil beras lainnya. Lebih lanjut, relatif rendahnya produktivitas di lahan pertanian baik langsung maupun tidak langsung tidak menunjang penerimaan keluarga dari kegiatan pokok.

Program pengembangan produksi pertanian, khususnya di daerah sampel nampaknya sangat perlu disusun secara komprehensif dan mencakup dengan kebijakan penampungan, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi agar berpengaruh nyata kepada kesejahteraan komunitas lokal. Di samping itu, program dimaksud sudah selayaknya didukung dengan pengadaan prasarana penunjang yang sangat penting seperti jaringan irigasi tersier atau pengadaan pompa air. Tanpa prasarana irigasi yang memadai akan selalu terjadi keterlambatan masa tanam dan masa panen yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan harga jual komoditi.

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN**

Program pemberdayaan petani miskin yang diterapkan oleh Departemen Pertanian dan dikelola melalui sistem BPLM. Tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani dengan jalan membantu petani dalam memproduksi komoditas pertanian tertentu. Dalam implementasinya BPLM diselenggarakan melalui PPA yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, dan PPKP dilaksanakan oleh Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pangan Kabupaten Jeneponto. PPA diarahkan untuk komoditas Palawija dan Kapas sedangkan PPKP untuk komoditas tanaman Padi Sawah dan tegalan, sejak tahun anggaran 2002.

Komunitas petani yang dapat diikutsertakan dalam sistem BPLM membentuk Kelompok Tani dengan jumlah anggota sekitar 100 orang petani jagung atau kapas. Pada tahun anggaran 2002, telah terbentuk lima Kelompok Tani Jagung dan Kapas yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati/Kepala Daerah Jeneponto sebagai penerima BPLM. Setiap kelompok yang diwajibkan menyusun rencana kerja usaha (RDKK) dan membuka rekening atas nama Kelompok Tani bersangkutan pada Bank BNI. Kelompok Tani dapat menentukan sendiri pembagian dana kepada anggota kelompoknya, termasuk cara dan jangka waktu pengembalian serta jasa atas bantuan modal yang diterima. Realisasi anggaran PPA pada tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 491.135.000,- ; tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 349.785.000,- dan tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 269.810.000,-

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas lapangan dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) diperoleh informasi bahwa terdapat tujuh tahapan yang ditempuh Pemda cq Dinas Pertanian dalam implementasi program BPLM tersebut. Antara lain adalah :

- a. Sosialisasi program dan proyek kepada petani;
- b. Persiapan seleksi calon petani dan calon lahan/lokasi (CPCL);
- c. Seleksi CPCL;
- d. Penerbitan SK Bupati;
- e. Penyaluran dana dari Kas Negara ke rekening Kelompok Tani;
- f. Pencairan dana kepada petani anggota Kelompok Tani;
- g. Pemupukan modal dan penegmbalian atau perguliran dana kepada anggota Kelompok Tani atau ke Kelompok Tani lainnya.

Di samping PPA dan PPKP, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Jeneponto menurut informasi juga menyalurkan bantuan pupuk dan bibit tanaman padi kepada kelompok tani tertentu guna mengatasi kebutuhan petani miskin dalam masa tanam. Kerjasama dengan lembaga non pemerintah juga dilakukan melalui program *Care Plan International* untuk membantu aktivitas produksi petani miskin. Secara khusus Pemda Kabupaten Jeneponto mengucurkan program khusus yang dinamakan Program Pengembangan Desa dan Kecamatan sejak tahun anggaran 2002. Dalam implementasinya program ini melibatkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Program ini lebih bersifat pembangunan fisik dalam bentuk pengadaan sarana atau perluasan jaringan sekunder dan tersier, sarana pelayanan kesehatan masyarakat dan pengadaan air bersih. Bentuk kemajuan yang mulai nampak adalah adanya jaringan penyaluran air bersih meskipun masih terbatas di ibukota kabupaten saja dengan kualitas air minimal sebagai bahan baku air minum.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat petani tanaman pangan dan palawija sudah pernah dilakukan melalui pengembangan dan dukungan dari aspek kelembagaan koperasi. Selama periode tahun 1980 dan 1990-an perkembangan organisasi koperasi beserta jumlah anggota meningkat cukup pesat berkat adanya berbagai fasilitas dan dukungan dana yang cukup berarti. Memasuki era millenium, nampak bahwa peran lembaga koperasi untuk memfasilitasi akses dan jaringan pasar produk-produk pertanian terkesan kurang memadai lagi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan bibit tanaman padi dan palawija tertentu.

Dari hasil wawancara ditemukan fakta bahwa sebagian besar penerima BPLM baik dari PPA maupun PPKP sama sekali tidak mengetahui atau bahkan tidak peduli sumber dana yang diterima dari proyek apa. Sekitar 53 persen petani responden mengaku tidak pernah menerima program untuk meningkatkan usaha pertanian, meskipun sebenarnya sejak dua tahun terakhir melalui Kelompok Tani yang ada menjadi peserta proyek PPA. Petani sampel tersebut yang mengaku menerima bantuan peningkatan produksi hanya

mengenal bahwa proyek dimaksud berasal dari pihak pemerintah, tanpa mampu mengindikasikan pemerintah pusat atau daerah. Sebagian petani peserta PPA ataupun PPKP beranggapan bahwa bantuan modal yang diterima dapat dikembalikan kapan saja. Berbagai opini yang berkembang tanpa arah ini pada suatu saat akan merugikan proyek itu sendiri dan juga Kelompok Tani lain yang berpeluang menerima dana bergulir tersebut. Kemungkinan yang dapat terjadi tergambarkan dari respons petani responden dimana sebanyak 43 persen (22 orang) bersikap tidak berminat untuk turut serta dalam program peningkatan penghasilan petani. Meskipun begitu alasan yang diberikan ternyata karena rendahnya pemahaman mereka terhadap aktivitas proyek itu sendiri.

Dari pihak penyelenggara proyek juga belum ditemukan suatu rancangan tertulis mengenai perguliran dana dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Terdapat kesan kuat bahwa sosialisasi yang sudah dilaksanakan berjalan kurang efektif dan kemungkinan karena kedua belah pihak (pengelola proyek dan penerima BPLM) kurang memahami dan menguasai petunjuk teknis kedua proyek tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak penyelenggara proyek di tingkat pusat kurang memperhitungkan kondisi petani lokal setempat yang akan menerima BPLM termasuk situasi geografis dan komoditi unggulan yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, sampai dengan observasi ini dilaksanakan belum pernah ada upaya khusus baik dari instansi setempat maupun dari tingkat pusat untuk mengamati apakah terdapat perubahan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi petani dengan adanya kedua proyek. Pola penyaluran dana belum diselaraskan dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Kecenderungan menyamaratakan kebutuhan petani di setiap lokasi terbukti tidak membuat proyek mampu terselenggara dengan efektivitas tinggi.

Kelompok Tani penerima BPLM di Desa Allu' Taroang dan Desa Ti'no, Kabupaten Batang hampir setiap terlambat bercocok tanam karena tidak tersedianya air di lahan mereka. Ketergantungan petani kepada perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan memperlambat kesempatan petani untuk menikmati keberadaan proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah. Oleh karena itu, BPLM akan lebih memadai apabila didahului dengan pengadaan prasarana pertanian seperti jaringan irigasi tersier, sarana pasca panen,

rancangan manajemen pemasaran hasil produksi, dlsbnya. Tanpa pasokan air yang memadai, maka penerapan teknologi apapun termasuk penggunaan input moderen seperti pupuk, bibit unggul, dll., tidak akan berarti sama sekali.

Pengadaan kebutuhan sarana pendukung untuk kedua proyek ini memang tidak seluruhnya harus dikelola oleh Departemen Pertanian. Namun kesulitan lain yang sering menghadang yaitu lemahnya kordinasi antar instansi akibat masih kuatnya ego sektoral di sejumlah instansi yang mengaku turut membangun masyarakat petani. Kondisi yang tidak menguntungkan ini ditambah lagi dengan kelambanan dalam mengantisipasi adanya perbedaan situasi lokal tentunya akan berakibat kepada upaya untuk mengentaskan masyarakat petani dari kemiskinan.

### **Kesimpulan Observasi**

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil observasi dan analisis adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Desa Allu' Taroang dan Ti'no sebagai desa penerima program pemberdayaan dapat dianggap sangat tepat. Hal ini sebab di kedua desa tempat dimana observasi ini dilakukan sebagian besar masyarakatnya hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan sumberdaya alam. Kemampuan menabung sangat rendah dan pengenalan modernisasi pertanian masih sangat terbatas. Penetapan kedua desa ini akan lebih bermakna apabila beberapa aspek penunjang program dipenuhi terlebih dahulu yaitu :
  - a. Sosialisasi program dilakukan secara tepat dan dipahami benar oleh masyarakat
  - b. Pencairan anggaran sebaiknya tepat waktu mengingat kedua daerah tersebut sangat tergantung kepada kondisi alam seperti curah hujan, pola pengairan, dlsbnya.
  - c. Pencapaian tujuan program sangat tergantung kepada keberadaan sarana pengairan dan pembuatan sumur artesis untuk mengatasi kekurangan air, terutama di musim kemarau.
  - d. Kondisi ini tentunya membutuhkan upaya yang bersifat intens khususnya melalui pengembangan kualitas SDM.

2. Kemiskinan di kedua desa tersebut dan secara umum di Kabupaten Jeneponto tidak sepenuhnya berasal dari kondisi sumberdaya alam setempat. Dalam hal tertentu, kemiskinan terjadi karena belum optimalnya fungsi pemerintahan setempat untuk memberdayakan petani setempat (kemiskinan struktural). Dari dua desa yang dijadikan daerah observasi, diketahui bahwa penyebab utama kemiskinan adalah sebagai berikut. *Pertama*, secara umum desa tersebut relatif miskin karena kandungan SDA belum dioptimalkan pemanfaatannya. *Kedua*, desa-desa tersebut tergolong tandus. *Ketiga*, lokasi desa relatif terisolasi dengan desa-desa lain. Selain itu masalah budaya sedikit banyak juga berpengaruh kepada kemiskinan desa-desa tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan budaya terkait dengan semangat untuk meningkatkan taraf hidupnya, ethos kerja, dll. Atas dasar ini maka upaya pengembangan tentunya bukanlah berdasarkan program yang seragam tetapi harus disesuaikan dengan kondisi spesifik setempat.
3. Beberapa komoditas pertanian dan perkebunan ternyata masih dapat dibudidayakan secara optimal apabila dikelola secara benar dengan dukungan sumberdaya air. Dari hasil wawancara dan data primer diketahui bahwa sebagian besar produk pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pola demikian menyebabkan pertumbuhan ekonomi di desa sampel berjalan sangat lambat. Sangat rendahnya tingkat tabungan menyebabkan kemampuan melakukan investasi sangat terbatas dan akibat lebih lanjut, produktivitas tenaga kerja juga rendah.
4. Pada kedua desa sampel diketahui bahwa terdapat variasi kepemilikan SDA, namun masing-masing masih memiliki peluang berkembang sesuai dengan potensi kandungan SDA-nya. Salah satu bentuk pengembangannya adalah dengan sistim agribisnis yang bertumpu pada kekuatan petani (padat karya), atau tidak dilakukan sepenuhnya dengan pola padat modal. Hal ini dimaksudkan agar tenaga kerja setempat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga nilai tambah dan *multiplier effect*-nya benar-benar dapat dinikmati penduduk setempat. Di samping itu alternatif lain yang tepat untuk diterapkan dalam kerangka memanfaatkan SDA yang terbatas adalah

dengan melakukan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi sebagai sumber penghasilan keluarga.

Pemberdayaan desa miskin selayaknya mempertimbangkan tiga unsur determinan sebagai berikut :

1. pengembangan agribisnis;
2. pengembangan SDM;
3. pengembangan lembaga.

Seluruh unsur pengembangan tersebut sangat tergantung kepada karakteristik desa dan penduduk miskin yang akan diberdayakan. Ini perlu dikemukakan karena tidak semua bentuk pemberdayaan desa miskin dapat dengan tepat diterapkan di semua tempat. Sebagai contoh, untuk desa yang miskin SDA pada dasarnya tidak bisa menggantungkan pada akses SDA, sedangkan jenis kegiatan pemberdayaan yang dapat diterapkan adalah melalui tanaman keras, kerajinan dengan bahan baku produk pertanian dan industri produk pertanian. Selanjutnya, untuk desa dengan ciri keterbatasan sumberdaya air sangat sulit menggantungkan pada tanaman sawah. Oleh karena itu alternatif pengembangan yang diperlukan adalah agribisnis yang tidak tergantung kepada pasokan air yang berlimpah seperti tanaman keras; tanaman ladang, dan perkebunan. Adapun unsur penunjang yang sangat perlu diperhatikan adalah program pelatihan ketrampilan SDM dengan cakupan pemahaman tentang cara bercocok tanaman perkebunan, perawatan tanaman keras; pembuatan kerajinan dari produk pertanian; industri produk pertanian.

Seyogyanya pendekatan yang dilakukan dalam menyusun program kebijakan adalah *bottom up*. Pendekatan *bottom up* didasarkan pada pemahaman bahwa usulan dari kalangan bawah (dalam hal ini petani miskin) mewakili kebutuhan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Sebelum perumusan rencana dilakukan, suatu studi kelayakan tentang rencana kegiatan perlu disusun dengan seksama. Misalnya, dalam hal masalah pasar, apabila kegiatan yang dikembangkan telah memberikan hasil maka harus ada jaminan bahwa hasil tersebut akan diserap oleh pasar. Selain pasar, aspek transportasi perlu mendapat perhatian sebab tanpa dukungan transportasi maka produksi

cenderung akan merugi. Selanjutnya, transportasi ini perlu mendapat dukungan dari kondisi jalan, jembatan, dll.

Prosedur pengusulan program dimulai dari tingkat desa sebagai hasil dari kesepakatan semua komponen perwakilan masyarakat desa. Kemudian secara hirarki diteruskan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk diteliti aspek kelayakan dan efektivitasnya sebelum diteruskan ke Pemerintah Provinsi atau Pusat. Langkah selanjutnya adalah koordinasi antar instansi yang mempunyai kaitan atau kegiatan sejenis. Pada tahap ini masalah dana dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan. Langkah ini dilanjutkan dengan pendataan untuk menentukan siapa saja yang akan terlibat sejak awal kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ....., Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jeneponto, 2003 dan 2004.
- ....., Statistik Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jeneponto, 2003 dan 2004.
- ML, Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Nafziger, E. Wayne, *The Economics of Developing Countries*, 3<sup>rd</sup> Edition, Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 2001.
- Tedjo Tripomo dan Udan, *Manajemen Strategi*, Rekayasa Sains, Bandung, 2005.